

**PENYUSUNAN LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
TRIWULAN I
TAHUN 2020**



**INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat karunia-Nya sehingga dapat kami selesaikan Laporan Monitoring dan evaluasi kinerja Triwulan Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 untuk periode bulan Maret Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas keuangan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Laporan Monitoring dan evaluasi kinerja Triwulan ini memuat segala transaksi kinerja dan keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten dalam jangka waktu satu tahun. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran disajikan sebagai output Laporan Pencapaian Target Kinerja pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TA. 2020.

Akhir kata, kami sadari bahwa laporan keuangan ini belumlah sempurna, sehingga kami mohon saran dan masukan, demi kemajuan dan perkembangan OPD kami.

Serang, Maret 2020

**INSPEKTUR PROVINSI BANTEN
SELAKU PEMERINTAH ANGGARAN**



Drs. H. E. KUSMAYADI, M.Si
NIP. 19610323 198903 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Banten tiap triwulannya pada Tahun Anggaran 2020;
2. Memperbandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran serta ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan Laporan Laporan Monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat Provinsi Banten adalah:

1. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan;
2. Menyediakan informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD per triwulan di Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Provinsi Banten diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN

A. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka tersebar luasnya informasi pengembangan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, Inspektorat Provinsi Banten mengemban tugas yang cukup besar sebagai pelaksanaan urusan wajib yang disediakan anggaran yang cukup besar.

B. Indikator Pencapaian Target Kinerja Apbd

Indikator pencapaian keberhasilan (Target Kinerja setelah perubahan), secara garis besar program Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020, terdiri dari :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 2 Dokumen)
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, 18 Laporan)
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 4 Dokumen)
2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, 14 bulan)
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen Laporan keuangan, 12 Laporan)
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dokumen Laporan keuangan, 12 Laporan; Laporan Dokumen Perpajakan, 12 Laporan)
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Pengadaan Pakaian Dinas, 1 Kegiatan)
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Terlaksananya Peningkatan kompetensi Aparatur; Diklat

Fungsional Teknis Subtantif, sertifikasi jabatan fungsional dan Kursus-kursus Singkat/Pelatihan, 3 Kegiatan)

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 1 kegiatan)
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Tersedianya bahan/alat perlengkapan kantor, 1 kegiatan)
- c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan, 2 Kegiatan)
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar daerah, 12 bulan)
- e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, 12 bulan)

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, 2 kegiatan)
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana kantor, 3 kegiatan)

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik, 1 kegiatan)
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Tersedianya jasa Pelayanan umum, 1 kegiatan)

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan, 6 Unit)
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional, 23 Unit)

- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor (Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Komputer), 146 unit)
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor, 4 kegiatan)

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Terlaksananya Audit Kinerja Pada Program & Keg Prov Banten (Irban 1), 1 kegiatan); Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemprov dan Kab Kota TA 2021 (Irban IV), 4 kegiatan)
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Terlaksananya Audit Ketaatan, MCP dan Pendampingan BPK,3 Kegiatan; Terlaksananya Audit Operasional Irban I, 8 Kegiatan; Terlaksananya Audit Operasional, Probity dan Monev BMD (Irban 2), 10 Kegiatan; Terlaksananya Audit, Reviu, Probity dan Evaluasi, 4 Kegiatan)
 - c. Reviu Laporan Kinerja (Terlaksananya Reviu Dokumen Penilaian Resiko OPD Prov Banten, 1 Kegiatan; Terlaksananya Reviu Dokumen Perencanaan dan Kinerja (Irban IV), 6 Kegiatan)
 - d. Reviu Laporan Keuangan (Terlaksananya Reviu DAK , LKPD Prov, Monev LKPD 2021 (IRBAN II), 3 Kegiatan; Terlaksananya Reviu & Monev IRBAN III, 6 Kegiatan; Terlaksananya Reviu RKA 2022, RKAP 2021, LKPD (IRBAN I), 3 Kegiatan)
 - e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Monitoring & TL IRBAN II 3 Kegiatan; Monitoring & TL IRBAN III 1 Kegiatan; Terlaksananya Pemantauan dan Tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI, BPKP, ITJEN, INSPEKTORAT, 4 Kegiatan)
- 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, 1 kegiatan)
 - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Terlaksananya Audit Tujuan Tertentu (Irban I), 1 Kegiatan)

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (Terlaksananya (Rakorwasda, Rakorwasnas, Rapim Evaluasi, Saresehan, DOPT&PKPT, Pemutakhiran Data Itjen), 6 Kegiatan; Tersusunnya Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan semester I dan II Inspektorat Provinsi, 2 Laporan; Tersusunnya Pergub Kebijakan Pembinaan Pengawasan dan SOP tentang Pengawasan, 4 Dokumen)
2. Pendampingan dan Asistensi
 - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Terlaksananya Kegiatan SATGAS AKD, 3 Kegiatan; Terlaksananya Keg Peningkatan Kapabilitas SPIP (Irban III), 2 Kegiatan; Terlaksananya Monev, dan Workshop PPUPD(Irban IV), 9 Kegiatan; Terlaksananya Monev LK, Kas Opname, Consulting dan Evaluasi SPIP (Irban I), 4 Kegiatan)
 - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Terlaksananya Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020, 1 Kegiatan)
 - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Terlaksananya HAKI 2021, 1 Kegiatan; Terlaksananya Keg.Tim Saber Pungli Prov Banten,1 Kegiatan; Terlaksananya Keg UPG Prov Banten, 1 Kegiatan; Tersusunnya Rencana Aksi PPK Daerah Prov Banten, 1 Dokumen)
 - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Terlaksananya kegiatan Komite Integritas Provinsi Banten, 1 Kegiatan)

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Inspektorat Provinsi Banten

Realisasi Belanja Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp.34.834.128.665,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.35.489.000.000,00 atau (98,15%), sisa anggaran Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp.654.871.335,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah		Lebih / (Kurang)	%
	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)		
2	3	4	5=4-3	6=4/3x1 00
BELANJA DAERAH				
BELANJA TIDAK LANGSUNG	35.489.000.000,00	34.834.128.665,00	(654.871.335,00)	98,15
Belanja Pegawai	35.489.000.000,00	34.834.128.665,00	(654.871.335,00)	98,15
Belanja Gaji dan Tunjangan	8.219.276.176,00	8.074.382.465,00	(144.893.711,00)	98,24
Belanja Gaji Pokok/Uang Representasi	5.555.920.644,00	5.491.909.200,00	(64.011.444,00)	98,85
Belanja Tunjangan Keluarga	617.414.512,00	605.992.990,00	(11.421.522,00)	98,15
Belanja Tunjangan Jabatan	135.490.000,00	127.930.000,00	(7.560.000,00)	94,42
Belanja Tunjangan Fungsional	840.060.000,00	830.270.000,00	(9.790.000,00)	98,83
Belanja Tunjangan Umum	27.890.000,00	20.370.000,00	(7.520.000,00)	73,04
Belanja Tunjangan Beras	331.544.800,00	320.241.240,00	(11.303.560,00)	96,59
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.000.000,00	6.325.904,00	(2.674.096,00)	70,29
Belanja Pembulatan Gaji	96.220,00	69.603,00	(26.617,00)	72,34
Iuran Premi Asuransi Kesehatan	639.360.000,00	626.593.524,00	(12.766.476,00)	98,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian	62.500.000,00	44.680.004,00	(17.819.996,00)	71,49
Tambahan Penghasilan ASN	27.269.723.824,00	26.759.746.200,00	(509.977.624,00)	98,13
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	21.648.223.824,00	21.301.246.200,00	(346.977.624,00)	98,40

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	5.621.500.000,00	5.458.500.000,00	(163.000.000,00)	97,10

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung terealisasi sebesar sebesar Rp.14.290.063.717,00 atau sebesar (93,40%) dari pagu anggaran sebesar Rp.15.299.538.000,00 sisa anggaran belanja langsung adalah sebesar Rp.1.009.474.283,00, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah		Lebih / (Kurang) 6 = 4 /3x10 0	% 6 = 4 /3x10 0
	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)		
2	3	4	5 = 4 - 3	
BELANJA DAERAH				
BELANJA LANGSUNG	15.299.538.000,00	14.290.063.717,00	(1.009.474.283,00)	93,40
Belanja Pegawai	2.543.650.000,00	2.473.850.000,00	(69.800.000,00)	97,26
Honorarium Non ASN	2.543.650.000,00	2.473.850.000,00	(69.800.000,00)	97,26
Honorarium Tim Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Banten	2.543.650.000,00	2.473.850.000,00	(69.800.000,00)	97,26
Belanja Barang dan Jasa	11.842.238.000,00	11.052.818.717,00	(789.419.283,00)	93,33
Belanja Bahan Pakai Habis	597.451.450,00	585.232.000,00	(12.219.450,00)	97,95
Belanja Alat Tulis Kantor	357.424.450,00	354.160.000,00	(3.264.450,00)	99,09
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	193.405.000,00	189.580.000,00	(3.825.000,00)	98,02
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	66,67
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5.212.000,00	5.212.000,00	0,00	100,00
Belanja Pengisian Gas	3.960.000,00	330.000,00	(3.630.000,00)	8,33
Belanja Vandel, Plakat, Piala, Medali dan Cinderamata	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bendera dan Umbul-umbul	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	100,00
Belanja Bahan Pakai Habis Peralatan Olah raga	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	842.482.700,00	637.719.851,00	(204.762.849,00)	75,70

Belanja Telepon/Faksimili/Internet	48.000.000,00	3.950.786,00	(44.049.214,00)	8,23
Belanja Listrik	540.000.000,00	400.005.815,00	(139.994.185,00)	74,08
Belanja Surat Kabar/Majalah	30.780.000,00	25.068.000,00	(5.712.000,00)	81,44
Belanja Jasa Kebersihan	199.702.700,00	196.783.000,00	(2.919.700,00)	98,54
Belanja Jasa TV Cable	24.000.000,00	11.912.250,00	(12.087.750,00)	49,63
Belanja Premi Asuransi	186.144.650,00	138.564.030,00	(47.580.620,00)	74,44
Belanja Premi Asuransi Kesehatan	25.110.000,00	16.428.614,00	(8.681.386,00)	65,43
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	116.174.650,00	86.414.050,00	(29.760.600,00)	74,38
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	42.610.000,00	34.874.916,00	(7.735.084,00)	81,85
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Non ASN	2.250.000,00	846.450,00	(1.403.550,00)	37,62
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	574.590.000,00	513.866.536,00	(60.723.464,00)	89,43
Belanja Jasa Service	256.530.000,00	249.863.536,00	(6.666.464,00)	97,40
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Bermotor	318.060.000,00	264.003.000,00	(54.057.000,00)	83,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	494.561.400,00	480.383.600,00	(14.177.800,00)	97,13
Belanja Cetak	422.448.300,00	414.200.000,00	(8.248.300,00)	98,05
Belanja Penggandaan	72.113.100,00	66.183.600,00	(5.929.500,00)	91,78
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00
Belanja Sewa Lapangan/Sarana Olah Raga	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman	736.842.000,00	708.004.300,00	(28.837.700,00)	96,09
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.700.000,00	524.390.300,00	(1.309.700,00)	99,75
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	211.142.000,00	183.614.000,00	(27.528.000,00)	86,96
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	100,00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
Belanja Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	5.825.071.000,00	5.583.894.200,00	(241.176.800,00)	95,86
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.548.295.000,00	5.320.733.000,00	(227.562.000,00)	95,90
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	276.776.000,00	263.161.200,00	(13.614.800,00)	95,08
Belanja Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis ASN	136.000.000,00	88.236.700,00	(47.763.300,00)	64,88
Belanja Pengiriman Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	10.002.900,00	(39.997.100,00)	20,01
Belanja Pengiriman Diklat Fungsional	86.000.000,00	78.233.800,00	(7.766.200,00)	90,97
Belanja Pemeliharaan	614.139.800,00	595.964.500,00	(18.175.300,00)	97,04
Belanja Pemeliharaan Komputer	96.049.800,00	94.048.500,00	(2.001.300,00)	97,92
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	176.500.000,00	163.500.000,00	(13.000.000,00)	92,63
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	341.590.000,00	338.416.000,00	(3.174.000,00)	99,07
Uang Saku dan Uang Makan	220.700.000,00	172.500.000,00	(48.200.000,00)	78,16
Uang Saku	41.700.000,00	4.800.000,00	(36.900.000,00)	11,51
Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	179.000.000,00	167.700.000,00	(11.300.000,00)	93,69
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan	593.700.000,00	528.975.000,00	(64.725.000,00)	89,10
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur	588.000.000,00	526.800.000,00	(61.200.000,00)	89,59
Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.700.000,00	2.175.000,00	(3.525.000,00)	38,16
Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	736.250.000,00	736.250.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan	679.250.000,00	679.250.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Operator/Administrasi/Teknis	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Pengujian	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	254.705.000,00	253.628.000,00	(1.077.000,00)	99,58
Belanja Dokumentasi	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00

Belanja Promosi dan Publikasi	253.565.000,00	252.488.000,00	(1.077.000,00)	99,58
Belanja Modal	913.650.000,00	763.395.000,00	(150.255.000,00)	83,55
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	109.500.000,00	0,00	(109.500.000,00)	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	109.500.000,00	0,00	(109.500.000,00)	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	123.600.000,00	116.246.000,00	(7.354.000,00)	94,05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	50.000.000,00	46.166.000,00	(3.834.000,00)	92,33
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	34.000.000,00	31.800.000,00	(2.200.000,00)	93,53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	39.600.000,00	38.280.000,00	(1.320.000,00)	96,67
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	100.550.000,00	81.670.000,00	(18.880.000,00)	81,22
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	100.550.000,00	81.670.000,00	(18.880.000,00)	81,22
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.000.000,00	8.840.000,00	(160.000,00)	98,22
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	9.000.000,00	8.840.000,00	(160.000,00)	98,22
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	266.000.000,00	262.639.000,00	(3.361.000,00)	98,74
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	266.000.000,00	262.639.000,00	(3.361.000,00)	98,74
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	300.000.000,00	294.000.000,00	(6.000.000,00)	98,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	300.000.000,00	294.000.000,00	(6.000.000,00)	98,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00

B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Kinerja yang telah ditetapkan

Realisasi belanja Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.49.124.192.382,00,- atau (96,72%) dari pagu anggaran sebesar Rp.50.788.538.00,00,- dan sisa anggaran sebesar Rp.1.664.345.618,00,-. Secara rinci dapat disampaikan sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.34.834.128.665,00 atau (98,15%) dari pagu anggaran sebesar Rp.35.489.000.000,00 terbagi atas Belanja Gaji dan Tunjangan, serta Tambahan Penghasilan PNS.

Belanja Gaji dan Tunjangan realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.8.074.382.465,00 atau (98,24%) dari pagu anggaran sebesar Rp.8.219.276.176,00.

Tambahan Penghasilan PNS realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.26.759.746.200,00 atau (98,13%) dari pagu anggaran sebesar Rp.27.269.723.824,00.

Untuk Belanja Gaji dan Tunjangan tidak terdapat hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, karena sudah sesuai dengan jumlah pegawai di Inspektorat Provinsi Banten.

B. Belanja Langsung:

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.14.290.063.717,00 atau (93,40%) dari pagu anggaran sebesar Rp.15.299.538.000,00, yang terbagi ke dalam kegiatan-kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2020, secara umum terdapat kendala dan hambatan yang dialami oleh Inspektorat Provinsi Banten dalam merealisasikan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2020, sehingga penyerapan realisasi tersebut ada yang masih dibawah target.

Hambatan dan kendala tersebut secara umum adalah:

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, Sisa Anggaran Rp.47.763.300,00, atau terealisasi (64,88%), sisa anggaran tersebut berasal dari belanja Pengiriman Kursus-kursus Singkat/Pelatihan dan belanja pengiriman diklat fungsional yang dalam pelaksanaannya penyelenggaraan Diklat/Pelatihan untuk jabatan fungsional jumlahnya dibatasi dan ditentukan oleh pusat;
2. Kegiatan Penyusunan Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan, sisa anggaran sebesar Rp.34.500.000,00, atau terealisasi (77,99%), sisa anggaran tersebut berasal dari efisiensi belanja uang saku dan belanja narasumber Penyusunan Pergub tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Provinsi Banten 2021;
3. Kegiatan Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten, sisa anggaran sebesar Rp.50.644.000,00,-, atau terealisasi (73,23%), sisa anggaran tersebut berasal dari efisiensi belanja uang saku, perjalanan Dinas Luar Daerah dan belanja narasumber pada Rapat Koordinasi Saresehan antara Inspektorat Provinsi Banten dengan Inspektorat Kabupaten/Kota.

C. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Hambatan utama kinerja keuangan yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, dikarenakan terkendala sistem dalam proses pergeseran anggaran penyesuaian kode rekening belanja dengan Standar Harga Satuan.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sisa Anggaran Rp. 401.912.900,00, atau terealisasi (69,53%), terdapat perbedaan antara jumlah prognosis dengan sisa anggaran dikarenakan terdapat efisiensi kontrak pada belanja penyediaan komponen instalasi listrik dan penyediaan bahan logistik kantor;
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sisa Anggaran Rp. 908.782.000,00, atau terealisasi (36,07%), terdapat perbedaan antara jumlah prognosis dengan sisa anggaran dikarenakan terdapat efisiensi kontrak pada

belanja modal bangunan gedung kantor, bangunan gedung untuk pos jaga dan belanja modal pagar;

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sisa Anggaran Rp. 678.573.062,00, atau terealisasi (53,25%), terdapat perbedaan antara jumlah prognosis dengan sisa anggaran dikarenakan terdapat efesiensi kontrak pada belanja belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor;
5. Kegiatan Pengawasan terkendala karena adanya refocusing anggaran dalam rangka penanggulangan bencana COVID-19.

BAB V

PENUTUP

Inspektorat Provinsi Banten pada tahun anggaran 2021 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. **60.802.400.000,-** untuk menunjang pelaksanaan 3 program dan 11 kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Banten.

Laporan Monev Kinerja Tahun Anggaran 2021 Inspektorat Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan informasi keuangan untuk mengukur kinerja pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.

Demikian Laporan Keuangan ini dibuat untuk dapat menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, Maret 2020

**INSPEKTUR PROVINSI BANTEN
SELAKU PEMERINTAH**



Drs. H. E. KUSMAYADI, M.Si
NIP. 19610323 198903 1 009